

## **Membangun Pendidikan Berwawasan Gender**

**Syaefudin Achmad**

*LAIN Salatiga*

*Email: syaefudinachmad1991@gmail.com*

---

**Submitted** : 2019-06-26

**Revision** :

**Reviewed** : 2019-07-02

**Published** : 2019-07-24

---

### **Abstract:**

The role of women in national development is increasingly significant and should not be underestimated. To build human resources for women, education is needed that upholds gender equality so that their rights to education can be realized. But inevitably, education in Indonesia in its history has experienced a dark period where women lacked rights in education. There was once a gender gap in the world of education in Indonesia. There are several factors that influence it, such as community culture and school structure systems that lack opportunities for women to take part. Therefore, gender-conscious education needs to be realized in order to address the gender issue. One effort to realize gender-oriented education can be by developing a gender-sensitive learning process approach through fostering and training teachers, principals, and education supervisors, as well as at the level of decision making in all national education management units.

**Keywords:** *education, woman, gender equality*

### **Abstrak:**

Peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Untuk membangun sumber daya manusia pada perempuan, diperlukan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender agar hak-hak mereka memperoleh pendidikan bisa terwujud. Namun tak bisa dipungkiri, pendidikan di Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami masa kelam dimana perempuan kurang memperoleh hak-hak dalam pendidikan. Pernah ada kesenjangan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hal itu, seperti kultur masyarakat dan sistem struktur sekolah yang kurang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah. Oleh karena itu, pendidikan berwawasan gender perlu diwujudkan demi menyelesaikan persoalan gender tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berwawasan gender bisa dengan mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui

pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan, serta pada tingkat pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional.

**Kata Kunci :** *pendidikan, perempuan, kesetaraan gender*

## **Pendahuluan**

Pada era globalisasi dimana kemajuan teknologi semakin tidak terbendung, perempuan memiliki kontribusi yang besar, signifikan, dan tidak bisa dianggap remeh. Tidak sedikit perempuan-perempuan hebat yang berpengaruh besar terhadap kemajuan zaman. Di era penjajahan, kita mengenal sosok Kartini yang berhasil mengangkat derajat kaum wanita. Di era modern sekarang, kita mengenal perempuan-perempuan hebat yang memiliki kontribusi luar biasa bagi masyarakat. Di Indonesia kita mengenal Sri Mulyani dan Menteri Susi. Keduanya merupakan sebagian kecil dari perempuan-perempuan yang luar biasa. Lahirnya perempuan-perempuan yang memiliki kontribusi lepas tentu tak lepas dari dunia pendidikan. Pendidikan berperan penting terhadap lahirnya perempuan-perempuan hebat di Indonesia, baik pendidikan formal, informal, maupun informal.

Perempuan sekarang tidak lagi seperti perempuan zaman dahulu yang hanya memiliki peran di rumah. Perempuan sekarang mampu mengembangkan potensinya yang membuatnya sejajar dengan kaum lelaki. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahulu menjadi milik mayoritas kaum lelaki, sekarang mulai banyak perempuan yang mengambil peran itu. Dalam beberapa posisi, tak jarang perempuan menjadi seorang pemimpin, dimana di antara yang dipimpin olehnya ada laki-laki. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang perempuan, begitupun kota Surabaya. Dalam dunia pendidikan, saat ini kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipimpin oleh seorang perempuan.

Namun tak bisa dipungkiri, dalam bidang pendidikan, persoalan-persoalan seputar gender memang sempat muncul. Perjalanan perempuan memperoleh hak-haknya dalam pendidikan sempat mendapat jalan terjal.

Perempuan sempat tidak seperti lelaki yang memiliki peluang yang besar untuk menikmati pendidikan. Akan tetapi, perlahan namun pasti, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan semakin kecil.

Untuk menciptakan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, tentu diperlukan konsep yang matang. Maka dari itu, tulisan ini disusun oleh penulis dalam rangka menjelaskan tentang konsep pendidikan berwawasan gender itu seperti apa, persoalan yang kerap muncul, serta solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini penting untuk dipahami bersama oleh praktisi pendidikan dalam mewujudkan sekolah berwawasan gender, agar perempuan memperoleh hak yang sama dalam dunia pendidikan, sehingga semakin banyak perempuan-perempuan hebat yang lahir di negeri ini.

### **Hakikat Pendidikan**

Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan berwawasan gender, perlu dipahami dulu hakikat tentang pendidikan. Banyak para pakar pendidikan yang mendefinisikan hakikat pendidikan, baik yang bermakna sempit, maupun yang bermakna sempit.

Di antara pakar yang mendefinisikan pendidikan secara sempit adalah Marimba, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir. Marumba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju kepribadian yang utama (Ahmad Tafsir, 2016: 34). Mengapa dikatakan sempit? Karena definisi ini belum mencakup semua yang dikenal sebagai pendidikan. Definisi Marumba membatasi, seolah-olah pendidikan hanya berupa pengaruh dari orang lain dengan sadar. Pendidikan oleh diri sendiri dan pendidikan oleh lingkungan seolah-olah tidak dimasukkan ke dalam definisi pendidikan. Ada pakar yang mendefinisikan pendidikan secara lebih sempit lagi, yaitu Park, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir. Park mendefinisikan pendidikan sebagai pengajaran

(Ahmad Tafsir, 2016: 35). Definisi ini hanya membatasi bahwa pendidikan itu adalah proses pengajaran di sekolah semata.

Definisi pendidikan secara luas bisa dilihat dari beberapa definisi berikut. Menurut Draf UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Draf UU Nomor 20 Tahun 2003). Definisi ini adalah yang kerap menjadi rujukan para pakar dan praktisi pendidikan.

Menurut Endang Hangestinisih, pendidikan merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Subyek, obyek atau sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh karena keberadaan manusia yang tidak dapat terlepas dari lingkungannya maka berlangsungnya proses pendidikan itu selamanya akan berkaitan erat dengan lingkungan dan akan saling mempengaruhi secara timbal balik. Ada beberapa konsepsi dasar pendidikan yang akan dilaksanakan yaitu: 1) Bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup; 2) Bahwa bertanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah; 3) Pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang (Endang Hangestinisih, 2015:8).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur-unsur pendidikan meliputi tujuan dari pendidikan, adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut dimana tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan bisa dengan proses pembelajaran, bimbingan, latihan, dan yang lain. Dari tujuan pendidikan tersebut, sejatinya berlaku umum. Pendidikan merupakan sesuatu yang berhak dinikmati oleh seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, kelamin, dan agama.

Namun dalam kaitannya dengan pendidikan berwawasan gender dalam tulisan ini, penulis memilih pendidikan dalam makna sempit, yaitu pendidikan yang dimaknai sebagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, penulis ingin memotret bagaimana pendidikan berwawasan gender di lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah.

### **Hakikat Gender**

Istilah kesetaraan gender memang sudah sangat populer, terutama di kalangan para aktivis perempuan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud gender? Bagaimana sejarah munculnya paham kesetaraan gender?

Paham Kesetaraan gender sendiri merupakan paham yang kurang ramah terhadap institusi keluarga. Munculnya paham ini tidak lepas dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560-1648 M yang memprotes segala penindasan yang mereka alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Protes ini kemudian terkonsep dalam sebuah gerakan yang disebut *Feminism*. Permasalahan pun muncul ketika konsep ini melahirkan berbagai macam aliran dan tuntutan. Feminis liberal menuntut kebebasan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sedang feminis marxis sosialis, memprotes institusi keluarga yang dianggap sebagai formalisasi penindasan

suami atas istri. Bahkan, feminis radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya hidup tanpa laki-laki atau *lesbianisme*. Oleh sebab itu di Barat paham ini sering dituduh sebagai gerakan penghancur institusi keluarga (Saiful Anwar, 2014: 20).

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000: 265). Istilah “gender” dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (Sri Sundari Sasongko, 2009: 267).

Definisi ini mengandung pengertian bahwa masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda yang telah disesuaikan dengan kodrat dan kapasitasnya masing-masing. Gender meyoroti aspek peran, fungsi dan tanggung jawab di dalam menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mansour Fakih sebagaimana yang dikutip oleh Iswah Adriana, seks (jenis kelamin) berbeda dengan gender. Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-

laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi *gender* diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam *gender* ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial (Iswah Adriana, 2009: 139).

Definisi gender menurut Mansour Fakih membarikan pengertian bahwa perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan karena hasil dikonstruksi secara sosial maupun kultural di sebuah kelompok masyarakat. Hal ini berarti, peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di sebuah daerah bisa jadi berbeda dengan fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di daerah lain.

Munculnya perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki disebabkan oleh beberapa hal yang bisa dijelaskan dari 3 teori gender, yaitu:

*Pertama*, Teori *Nurture*. Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Kedua*, Teori *Nature*. Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

*Ketiga*, Teori *Equilibrium*. Teori ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus

memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal Sri Sundari Sasongko, 2009: 17-20).

Dari ketiga teori tersebut, teori *equilibrium* adalah teori yang bisa diterima dan mengakomodasi kepentingan perempuan. Antara perempuan dan laki-laki memang tidak bisa terlepas. Keduanya saling bahu membahu dan bekerja sama sesuai dengan porsi dan nya masing-masing dimana untuk porsi dan sangat tergantung dari lingkungan sosial di masing-masing daerah. Bisa jadi porsi dan peran perempuan dan laki-laki di sebuah daerah berbeda dengan daerah lain.

Konsep gender berbeda dengan konsep seks. Berikut perbedaan konsep seks dan konsep gender (Mufidah, 2010: 61):

Seks / Jenis Kelamin	Gender
Perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kodrat</li> <li>2. Ciptaan Tuhan</li> <li>3. Dikenali sejak lahir</li> <li>4. Tidak dapat diubah</li> <li>5. Bersifat universal</li> <li>6. Berlaku sepanjang zaman</li> </ol>	Perbedaan peran, tanggung jawab laki-laki berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi sosial</li> <li>2. Dibuat oleh manusia</li> <li>3. Dapat berubah</li> <li>4. Dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan komitmen, kesempatan, dan kemampuan</li> <li>5. Beradaptasi dengan budaya</li> </ol>

Dari perbedaan antara seks dengan gender, dalam kaitanya dengan dunia pendidikan, bisa dipahami bahwa hak mendapatkan pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan karena keduanya mampu menjalankan peran tersebut.



Pendidikan bukan sebuah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, atau perempuan saja.

### **Persoalan Gender di Dalam Pendidikan**

Keadilan dan kesetaraan gender didefinisikan sebagai suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatan (Dwi Edi Wibowo, 2010:190).

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. (Iswah Adriana, 2009: 139)

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan memang harus terwujud karena pendidikan merupakan bagian dari beberapa aspek yang berhak

dinikmati oleh perempuan. Namun tak bisa dipungkiri, persoalan gender memang muncul di dalam dunia pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang persoalan gender dalam bidang pendidikan, banyak persoalan tentang kesenjangan gender di Indonesia. Hal ini perlu agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah pahit di masa lalu terkait kesenjangan gender sehingga bisa mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Kesenjangan gender di Indonesia terdeskripsikan dari beberapa hal yang merendahkan harkat dan martabat perempuan, antara lain:

*Pertama*, masih banyak perempuan dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif (bias gender). *Kedua*, banyaknya penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dengan penghasilan yang menjanjikan (TKW, dsb.). *Ketiga*, perlindungan hukum yang kurang memadai terhadap tindak kekerasan, perkosaan, dan penyiksaan fisik dan nonfisik. *Keempat*, budaya kawin muda (<16 tahun) yang diikuti dengan tingkat perceraian yang tinggi dapat merendahkan martabat perempuan. *Kelima*, diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja (peraturan sekolah yang masih bias gender). *Keenam*, adanya budaya, adat istiadat yang bias gender (laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan domestik, perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi). *Ketujuh*, dari aspek kesehatan reproduksi, masih ada pendapat bahwa KB adalah urusan perempuan (tabu untuk dibicarakan secara terbuka) (Sri Sundari Sasongko, 2009: 27).

Secara lebih detail, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam beberapa bentuk, yaitu (Mursidah, 2013: 282):

*Pertama*, Marginalisasi atau proses peminggiran/ pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Beberapa contoh bentuk marginalisasi antara lain, promosi jabatan, biasanya diprioritaskan untuk laki-laki karena keyakinan pimpinan laki-laki lebih hebat dibandingkan perempuan, pelatihan

teknologi diprioritaskan untuk laki-laki sehingga perempuan secara ekonomi semakin terpinggirkan. Karena pendidikan perempuan rendah, maka pekerjaan yang bisa dia ambil adalah sektor pekerjaan subsisten dengan upah yang rendah (Dwi Edi Wibowo, 2010: 190).

*Kedua*, Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.

*Ketiga*, Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

*Keempat*, Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

*Kelima*, Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dari beberapa persoalan tentang gender di Indonesia, sudah disinggung tentang persoalan gender dalam bidang pendidikan. Namun secara lebih rinci, Ada tiga aspek permasalahan gender dalam pendidikan yaitu, 1). Akses (fasilitas pendidikan yang sulit dicapai, 2). Partisipasi (tercakup dalam bidang studi dan statistik pendidikan, banyaknya perempuan mengambil bidang keguruan (SPG misalnya) karena pandangan yang mengatakan bahwa peran guru sebagai pembina juga pengasuh digambarkan sebagai kodrat perempuan sebagai ibu, oleh karenanya 99 % SPG diminati perempuan (menjadi guru SMP), STM 99,5% laki- laki, guru TK sebagian besar juga perempuan hal ini dipengaruhi stereotipe gender, 3). Manfaat dan penguasaan (banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan) (Yu'timaalahuyatazaka, 2014: 291).

Kesenjangan gender (gender gap) di bidang pendidikan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator makro kesetaraan dan keadilan gender yaitu Gender Development Index (GDI). Pada tahun 1998, GDI Indonesia berada pada posisi ke 90 dari 174 negara, tahun 2001 berada pada urutan ke 92 dari 146 negara. Tahun 2002 dan 2003 Indonesia berada pada ranking 91 dari 146 negara yaitu posisi paling rendah diantara negara-negara Asean, Singapura pada ranking 28, Malaysia 53, Thailand 61, Philipina 66 dan Vietnam 89 (Wahyu Widodo, 2006: 122).

Walaupun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Sebagai contoh, pada 1980, hanya 63% perempuan yang melek huruf dibandingkan dengan 90% laki-laki. Sepuluh

tahun kemudian persentase melek huruf untuk perempuan meningkat menjadi 79% dan laki-laki menjadi 90%. Pada tahun 1998, kesenjangan melek huruf antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil (laki-laki= 93,4%, dan perempuan= 85%). Namun jika dilihat dari jumlahnya, masih terdapat 1.1,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan hanya 5,2 juta laki-laki. (Ace Suryadi, 2001: 1).

Persoalan-persoalan gender dalam pendidikan tidak seharusnya terjadi karena terdapat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dalam pasal 48 disebutkan bahwa: “wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

### **Faktor Penyebab Munculnya Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan**

Kesenjangan gender yang muncul dalam dunia pendidikan tentu ada faktor yang menyebabkannya. Menurut Arief Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Harum Natasha, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender dalam pendidikan, diantaranya (Harum Natasha, 2013: 58-59):

*Pertama*, kultur yang memorduakan perempuan. Tak bisa dipungkiri, kultur masyarakat Indonesia seolah-olah menempatkan perempuan sebagai sosok yang perannya hanya sebatas menjadi ibu bagi anak-anaknya, serta mengurus rumah tangga semata. Mereka sebenarnya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun melepaskan dari kultur bukan sesuatu yang mudah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan terutama di desa, yang merasa cukup untuk sekolah sampai tingkat SMA saja.

*Kedua*, sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ternyata masih menyebar di sekolah dalam sistem struktur sekolah.

*Ketiga*, lemahnya kesetaraan gender. Istilah kesetaraan gender ternyata belum didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam lembaga negara. Lemahnya kesetaraan gender ini memerlukan resolusi politik yang menopang dan mengusung kesetaraan gender. Sebagai contoh peraturan daerah yang membedakan antara gaji perempuan dengan laki-laki.

*Keempat*, manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah. Perempuan cenderung mengalah demi mengurus anak dan keluarga, padahal sebenarnya dia masih bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 dan S3. Namun karena harus mengurus keluarga dan rumah tangga, akhirnya suami yang berkesempatan melanjutkan pendidikannya.

*Kelima*, kesepakatan pasangan yang mengalahkan perempuan. Dalam menjalin sebuah hubungan yang serius seperti menjadi suami dan istri, biasanya ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga. Kesepakatan-kesepakatan ini terkadang mengalahkan perempuan. Perempuan tak mampu berbuat banyak karena kultur di Indonesia kurang mendukungnya. Perempuan yang lebih ngotot memilih melanjutkan pendidikannya setelah menikah, dibanding memberikan kesempatan itu ke suami mungkin akan dipandang sebagai perempuan kurang baik.

### **Hakikat Pendidikan Berwawasan Gender**

Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Dengan kata lain lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan

terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan (Mursidah, 2013: 278). Pernyataan ini melihat dari segi fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender.

Gender dan kesetaraan gender merupakan satu kesatuan paham atau ide yang tidak bisa dipisahkan, pemisahan gender dengan sex (jenis kelamin) sebagai sesuatu yang relatif meniscayakan adanya usaha terhadap kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan mengartikan kesetaraan gender sebagai Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan **berpartisipasi** dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Saiful Anwar, 2014: 212). Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, pendidikan berwawasan gender lebih meyoroti pengaruh utama gender dimana kesetaraan gender dipahami sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan.

Dari dua pandangan tentang pendidikan berwawasan gender di atas, sekolah di pandang sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender, sekaligus sebagai tempat mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang **pendidikan**. Ini hakikat dari pendidikan berwawasan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan.

### **Upaya Mewujudkan Pendidikan Berwawasan Gender**

Dalam rangka menyampaikan nilai dan norma gender dalam dunia pendidikan, Saat ini sudah merambah melalui lembaga formal salah satunya adalah lembaga pendidikan dengan memasukkan ke dalam mata pelajaran sampai pada kurikulum yang dibuat berbasis gender. Bukti masuknya ide ini

dalam kurikulum dapat dilihat dari adanya Kurikulum Kesetaraan Gender. (IKKG) dengan nilai-nilai integritasi pada Kurikulum yang wajib dilaksanakan guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: persamaan hak laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, partisipasi laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan, kerja sama laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, menghargai kemajemukan, demokrasi (Mursidah, 2013: 278).

Pernyataan ini memberikan penjelasan bahwa salah satu pendidikan berwawasan gender adalah dengan menciptakan kurikulum berbasis gender. Kurikulum dibuat dalam rangka menyampaikan nilai dan norma kesetaraan gender kepada peserta didik. Hal ini penting agar tertanam di dalam diri peserta didik perasaan untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Dalam rangka mewujudkan sekolah yang bisa mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan, perlu dipahami dulu ukuran-ukuran sekolah yang mewujudkan kesetaraan gender itu seperti apa. Ukuran sekolah yang berwawasan gender di antaranya tidak boleh mendiskriminasikan jenis kelamin tertentu atau bias gender, melainkan harus ada unsur keadilan, keterbukaan dan keseimbangan gender. Hal ini sesuai dengan komitmen internasional maupun nasional yang telah menyepakati untuk menghapus kesenjangan gender dalam berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut perlu adanya perubahan dan pembaharuan pendidikan sebagai wujud reformasi dan rekonstruksi baik dalam sistem, budaya, maupun isi (content), secara memadai dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender (Wahyu Widodo, 2006: 122).



Upaya-upaya dalam mewujudkan pendidikan berwawasan gender di dalam lingkup sekolah di antaranya sebagai berikut (Yenita Roza dan Rahmita, 2014: 176):

*Pertama*, kepemimpinan dalam sekolah tersebut dibuat secara horizontal dan *teamwork*, bukan vertikal dan otoriter. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut untuk bisa bekerja sama dengan guru dan karyawan sekolah dengan baik. Kepala sekolah harus terbuka untuk menerima saran dari para guru dan karyawan sekolah. Selain itu, manajemen tidak menawarkan peran stereotip gender.

*Kedua*, dalam pembagian peran dan posisi dilakukan secara fleksibel, tergantung pada kebutuhan, kesempatan, komitmen, dan kualitas. Pembakuan posisi secara ketat banyak menimbulkan masalah (*stereotipi, subordinasi, marginalisasi*, beban lebih, dan kekerasan). Selain itu, mekanisme dalam mengambil keputusan harus seimbang dan memperhatikan kuota minimum untuk perempuan, budaya sekolah harus menghindari perilaku yang stereotipi, diskriminatif, merendahkan salah satu jenis kelamin, serta manajemen harus dibuat ramah terhadap perempuan.

Sosok yang paling berperan penting dalam mewujudkan sekolah berwawasan gender adalah kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. Namun kepala sekolah perlu mengajak seluruh guru, karyawan, serta seluruh siswa untuk bersama-sama mewujudkan sekolah yang berwawasan gender.

Menciptakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dan lembaga pendidikan yang lain akan lebih mudah diwujudkan jika ada langkah konkrit yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. *Pertama*, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis, dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. *Kedua*, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi

di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. *Ketiga*, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi (Iswah Adriana, 2009: 144).

.Untuk mewujudkan tujuan seperti itu, tujuan tersebut dapat diwujudkan secara optimal, terlebih dahulu perlu ditingkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada semua tingkatan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Demikian pula perlu ditingkatkan partisipasi perempuan, terutama pada tingkat pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional (Iswah Adriana, 2009: 145).

### **Pentingnya Pendidikan Berwawasan Gender**

Pendidikan berwawasan gender perlu diwujudkan karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan perempuan, yang berimbas terhadap kemajuan sebuah negara. Diantara beberapa dampak positif dari pendidikan berwawasan gender adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pendidikan tidak hanya sangat membantu menghilangkan anggapan bahwa wanita adalah lebih rendah, melainkan juga membantu menghilangkan rendahnya status mereka. Oleh karenanya pendidikan kaum wanita adalah kebutuhan seluruh dunia. Pendidikan kaum wanita telah menjadi keharusan yang bersifat internasional, karena kemajuan yang merupakan kebutuhan mendesak itu menciptakan dan sekaligus menuntut jenis wanita yang baru. Persoalannya ialah bagaimana menyediakan dasar-dasar pendidikan tidak atas dasar perikemanusiaan semata; kaum wanita harus

diberi segala persyaratan untuk ikut ambil bagian dalam membangun dunia ini (Rosniati Hakim, 2011: 201). Dengan terwujudnya pendidikan berwawasan gender, maka kultur yang memorduakan perempuan bisa perlahan dihilangkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perempuan punya peluang yang lebih besar untuk berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi jika kultur tersebut telah hilang.

*Kedua*, peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Perempuan yang berpendidikan tinggi mampu membuat keluarganya lebih sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya. Selain itu perempuan berpendidikan tinggi memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya rendah akan lebih rentan terhadap tindak kekerasan (baik psikis maupun fisik) dan memiliki tingkat kesehatan dan ekonomi yang cenderung lebih rendah (Rahmi Fitrianti dan Habibullah, 2012: 86).

Perempuan adalah sosok yang punya andil besar untuk memajukan sebuah negara. Jumlah perempuan saat ini lebih besar dibanding laki-laki. Jika perempuan di sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang baik, maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memajukan negara. Perempuan yang memiliki sumber daya manusia yang baik bisa mendidik anaknya secara berkualitas, merawat anaknya dengan baik sehingga tumbuh dengan sehat, serta mengambil posisi tertentu di pemerintahan yang tentu sangat berperan penting terhadap kemajuan negara. Sebaliknya, jika sumber daya manusia perempuan buruk, padahal jumlah perempuan di negara tersebut lebih banyak dibanding laki-laki, maka bisa dikatakan negara tersebut sulit untuk maju.

Selain itu, harkat dan martabat perempuan bisa terjaga lewat pendidikan yang tinggi. Perempuan yang bodoh dan tidak berpendidikan cenderung lemah dan rentan mengalami kekerasan dan pelecehan.

Menurut Suryadi dan Idris sebagaimana yang dikutip oleh Rahmi Fitriyanti dan Habibullah, pendidikan yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada akses terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal yang berupah rendah. Selain itu pengaruh pendidikan memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan (Rahmi Fitriyanti dan Habibullah, 2012: 85). Oleh karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang penting dan akan mengangkat derajat dan martabat perempuan sehingga bisa sejajar dengan laki-laki. Jadi yang penulis maksud dengan pendidikan berwawasan gender adalah pendidikan yang di dalamnya ada nilai-nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

### **Simpulan**

Perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kaum perempuan masih belum mendapatkan porsi yang adil di dalam bidang pendidikan. Banyak kaum perempuan yang belum mendapatkan kesempatan yang luas untuk menikmati pendidikan seperti kaum laki-laki. Selain untuk memenuhi hak mereka, pendidikan berwawasan gender perlu digalakkan karena memberikan banyak manfaat. Pendidikan berwawasan gender akan menaikkan kehormatan wanita sekaligus menjadikan mereka memiliki kontribusi yang lebih untuk pembangunan negara. Pendidikan berwawasan gender bisa digambarkan dari segi fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender, pengarus utamaan gender dimana kesetaraan gender dipahami sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan,

serta kurikulum yang berbasis gender. Kesetaraan gender di dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membangun sumber daya manusia perempuan. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, peran penting perempuan sangat dibutuhkan dalam memajukan negara.

### Daftar Pustaka

- Adriana, I. (2019). "Kurikulum Berwawasan Gender". Tadrîs. *Volume 4. Nomor 1* (2009): 137-152
- Anwar, S. (2014). "Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender". *Jurnal At-Ta'dib* Vol. 9. No. 2 (2014): 199-224
- Fitrianti R & Habibullah. (2012). "Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan", *Sosiokonsepsia*. Vol. 17. Nomor. 1 (2012): 85-100
- Hangestinisngsih, E., dkk. (2015). *Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: FKIP UNJ
- Mufidah. (2010). *Gender di Pesantren Salaf*. Malang: UIN Maliki Press
- Mursidah. (2013). "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender". *Muwâzâh*. Volume 5. Nomor 2. (2013): 277-291
- Natasha, H. (2013). "Ketidaksetaraan Gender di Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi". *Marwab*. Vol. XII. No.1 (2013): 53-54
- Roza Y. & Rahmita. (2016). "Pelaksanaan Program Sekolah Berwawasan Gender di Provinsi Riau". *Marwab*. Vol. XV. No. 2 (2016): 173-188
- Sundari, Sri Sasongko. (2009). *Teori dan Konsep Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Suryad, A. (2001). *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Badan Petencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

- Tafsir, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bandung: Fokus Media.
- Wibowo, D. E. (2010). "Sekolah Berwawasan Gender". *Muwâzâh*. Vol. 2. No. 1 (2010): 189-196
- Widodo, W. (2006). "Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender Di Propinsi Jawa Timur". *Humanity*. Volume 1. Nomor 2. (2006): 122-128
- Yu'timaalahuyatazaka. (2014). "Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume III. Nomor 2 (2014): 289-306